



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020. Penerapan standar biaya masukan Tahun Anggaran 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur dan indikasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran lembaga;
  - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perlu diatur pedoman standar biaya, standar struktur biaya dan indikasi;
  - c. bahwa Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2019 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 7);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 10)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
8. TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program / non program dan kegiatan / non kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
10. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Umum maupun Standar Biaya Khusus sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-SKPD;
11. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, jumlah dan indeks yang berlaku untuk seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang

- ditetapkan sebagai acuan biaya atau jumlah dalam penyusunan RKA-SKPD dan Pelaksanaan APBD;
12. Standar Biaya Khusus adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, jumlah dan indeks yang berlaku untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang memiliki kebutuhan khusus yang ditetapkan sebagai acuan biaya atau jumlah dalam penyusunan RKA-SKPD dan pelaksanaan APBD;
  13. Harga Satuan Biaya Masukan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen kegiatan;
  14. Tarif Biaya Masukan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen kegiatan;
  15. Indeks Biaya adalah Standar Biaya yang merupakan gabungan beberapa barang / jasa untuk penghitungan biaya komponen kegiatan;
  16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggung jawaban Pengguna Anggaran / tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit

## BAB II STANDAR BIAYA

### Pasal 2

1. Standar Biaya berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) untuk menyusun biaya dalam komponen kegiatan dalam RKA-SKPD berbasis kinerja dan sebagai dasar pelaksanaan APBD;
2. Fungsi Standar Biaya sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya dalam

penyusunan RKA-SKPD dan sebagai dasar pelaksanaan APBD;

3. Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; atau
  - b. estimasi.
4. Fungsi Standar Biaya sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
5. Fungsi Standar Biaya sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

1. Standar Biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dan sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) belum termasuk pajak dan pungutan lainnya kecuali untuk jasa sewa;
3. Pengaturan mengenai Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### Pasal 4

1. Standar Biaya yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat mengikuti Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya;

2. Dalam hal satuan biaya melebihi sebagaimana yang diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II, pengajuan RKA disertai dengan Surat Pernyataan tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, dengan tidak melebihi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Biaya Masukan dan atau Peraturan Perundang-undangan;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya

BAB III  
KETENTUAN LAIN - LAIN  
Pasal 5

Berkaitan dengan Standar Biaya Lain-lain yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka wajib ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati yang sebelumnya mendapatkan Persetujuan TAPD dengan mempertimbangkan efisiensi Anggaran;

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 02 Januari 2020

l BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR l

  
HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 02 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR



SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2020 NOMOR 7



## STANDAR BIAYA UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

| No. | URAIAN  | RINCIAN KEGIATAN   | SATUAN   | STANDAR BIAYA (Rp.)  | KET  |
|-----|---|--|--|--|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  |
| 1   | <b>HONORARIUM :</b>   |  |  |  |  |
| a   | Nilai Pagu Belanja s.d 500.000.000,-                            | <b>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</b><br>- Pengguna Anggaran<br>- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br>- Pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM<br>- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)<br>- Bendahara Pengeluaran,<br>Bendahara Pembantu<br><br><b>b. Tim Pelaksana Kegiatan</b><br>- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>- Anggota<br><br><b>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Barang & Jasa (konstruksi)<br>- Barang (non konstruksi)<br>- Jasa (non konstruksi)<br><br><b>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Ketua<br>- Sekretaris<br>- Anggota  | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br><br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br><br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br><br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br>Orang/Paket | Rp 1,100,000<br>Rp 1,100,000<br>Rp 1,000,000<br>Rp 550,000<br><br>Rp 500,000<br>Rp 500,000<br>Rp 350,000<br><br>Rp 515,000<br>Rp 310,000<br><br>Rp 800,000<br>Rp 760,000<br>Rp 700,000<br><br>Rp 420,000<br>Rp 320,000<br>Rp 220,000       | Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Berjumlah 3 (tiga) orang |
| b   | Nilai Pagu Belanja di atas 500.000.000,- s.d 1.000.000.000,-    | <b>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</b><br>- Pengguna Anggaran<br>- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br>- Pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM<br>- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)<br>- Bendahara Pengeluaran,<br>Bendahara Pembantu<br><br><b>b. Tim Pelaksana Kegiatan</b><br>- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>- Anggota<br><br><b>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Barang & Jasa (konstruksi)<br>- Barang (non konstruksi)<br>- Jasa (non konstruksi)<br><br><b>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Ketua<br>- Sekretaris<br>- Anggota | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br><br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br><br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br><br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br>Orang/Paket | Rp 1,300,000<br>Rp 1,300,000<br>Rp 1,000,000<br>Rp 650,000<br><br>Rp 570,000<br>Rp 500,000<br>Rp 400,000<br><br>Rp 610,000<br>Rp 370,000<br><br>Rp 1,000,000<br>Rp 900,000<br>Rp 700,000<br><br>Rp 520,000<br>Rp 420,000<br>Rp 320,000     | Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Berjumlah 3 (tiga) orang |
| c   | Nilai Pagu Belanja di atas 1.000.000.000,- s.d 5.000.000.000,-  | <b>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</b><br>- Pengguna Anggaran<br>- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br>- Pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM<br>- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)<br>- Bendahara Pengeluaran,<br>Bendahara Pembantu<br><br><b>b. Tim Pelaksana Kegiatan</b><br>- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>- Anggota<br><br><b>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Barang & Jasa (konstruksi)<br>- Barang (non konstruksi)<br>- Jasa (non konstruksi)<br><br><b>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Ketua<br>- Sekretaris<br>- Anggota  | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br><br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br><br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br><br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br>Orang/Paket | Rp 1,800,000<br>Rp 1,800,000<br>Rp 1,500,000<br>Rp 750,000<br><br>Rp 660,000<br>Rp 700,000<br>Rp 500,000<br><br>Rp 700,000<br>Rp 430,000<br><br>Rp 1,200,000<br>Rp 1,100,000<br>Rp 1,000,000<br><br>Rp 620,000<br>Rp 520,000<br>Rp 420,000 | Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Berjumlah 3 (tiga) orang |
| d   | Nilai Pagu Belanja di atas 5.000.000.000,- s.d 10.000.000.000,- | <b>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</b><br>- Pengguna Anggaran<br>- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br>- Pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM<br>- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)<br>- Bendahara Pengeluaran,<br>Bendahara Pembantu  | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br><br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan   | Rp 2,000,000<br>Rp 2,000,000<br>Rp 1,800,000<br>Rp 850,000<br><br>Rp 770,000<br>Rp 850,000<br>Rp 600,000   |  |

| No. | URAIAN   | RINCIAN KEGIATAN  | SATUAN  | STANDAR BIAYA (Rp.)  | KET  |
|-----|--|---|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  | 6  |
|     |  | <b>b. Tim Pelaksana Kegiatan</b><br>- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>- Anggota<br><br><b>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Barang & Jasa (konstruksi)<br>- Barang (non konstruksi)<br>- Jasa (non konstruksi)<br><br><b>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Ketua<br>- Sekretaris<br>- Anggota  | Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br><br>Orana/Paket<br>Orana/Paket<br>Orana/Paket<br><br>Orana/Paket<br>Orana/Paket<br>Orana/Paket  | Rp 820.000<br>Rp 500.000<br><br>Rp 1.500.000<br>Rp 1.400.000<br>Rp 1.200.000<br><br>Rp 770.000<br>Rp 670.000<br>Rp 570.000   | Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Berjumlah 3 (tiga) orang |
| e   | Nilai Pagu Belanja di atas 10.000.000.000,- s.d 25.000.000.000,-   | <b>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</b><br>- Pengguna Anggaran<br>- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br>- Pejabat penilai tagihan dan penandatanganan SPM<br>- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)<br>- Bendahara Pengeluaran,<br>Bendahara Pembantu<br><br><b>b. Tim Pelaksana Kegiatan</b><br>- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>- Anggota<br><br><b>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Barang & Jasa (konstruksi)<br>- Barang (non konstruksi)<br>- Jasa (non konstruksi)<br><br><b>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Ketua<br>- Sekretaris<br>- Anggota | Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br><br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br><br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br><br>Orana/Paket<br>Orana/Paket<br>Orana/Paket<br><br>Orana/Paket<br>Orana/Paket<br>Orana/Paket                                   | Rp 2.500.000<br>Rp 2.500.000<br>Rp 2.000.000<br>Rp 1.000.000<br><br>Rp 880.000<br>Rp 1.000.000<br>Rp 800.000<br><br>Rp 940.000<br>Rp 570.000<br><br>Rp 2.000.000<br>Rp 1.800.000<br>Rp 1.500.000<br><br>Rp 910.000<br>Rp 810.000<br>Rp 710.000         | Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Berjumlah 3 (tiga) orang |
| f   | Nilai Pagu Belanja di atas 25.000.000.000,- s.d 50.000.000.000,-   | <b>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</b><br>- Pengguna Anggaran<br>- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br>- Pejabat penilai tagihan dan penandatanganan SPM<br>- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)<br>- Bendahara Pengeluaran,<br>Bendahara Pembantu<br><br><b>b. Tim Pelaksana Kegiatan</b><br>- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>- Anggota<br><br><b>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Barang & Jasa (konstruksi)<br>- Barang (non konstruksi)<br>- Jasa (non konstruksi)<br><br><b>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Ketua<br>- Sekretaris<br>- Anggota | Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br><br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br><br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br><br>Orana/Paket<br>Orana/Paket<br>Orana/Paket<br><br>Orana/Paket<br>Orana/Paket<br>Orana/Paket                                   | Rp 3.200.000<br>Rp 3.200.000<br>Rp 3.000.000<br>Rp 1.250.000<br><br>Rp 990.000<br>Rp 1.200.000<br>Rp 900.000<br><br>Rp 1.245.000<br>Rp 640.000<br><br>Rp 2.200.000<br>Rp 2.000.000<br>Rp 1.500.000<br><br>Rp 1.060.000<br>Rp 960.000<br>Rp 860.000     | Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Berjumlah 3 (tiga) orang |
| g   | Nilai Pagu Belanja di atas 50.000.000.000,- s.d 100.000.000.000,-  | <b>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</b><br>- Pengguna Anggaran<br>- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br>- Pejabat penilai tagihan dan penandatanganan SPM<br>- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)<br>- Bendahara Pengeluaran,<br>Bendahara Pembantu<br><br><b>b. Tim Pelaksana Kegiatan</b><br>- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>- Anggota<br><br><b>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Barang & Jasa (konstruksi)<br>- Barang (non konstruksi)<br>- Jasa (non konstruksi)<br><br><b>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Ketua<br>- Sekretaris<br>- Anggota | Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br><br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br><br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br><br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br><br>Orana/Paket<br>Orana/Paket<br>Orana/Paket<br><br>Orana/Paket<br>Orana/Paket<br>Orana/Paket | Rp 3.500.000<br>Rp 3.500.000<br>Rp 3.200.000<br>Rp 1.500.000<br><br>Rp 1.250.000<br>Rp 1.500.000<br>Rp 1.000.000<br><br>Rp 1.250.000<br>Rp 810.000<br><br>Rp 2.400.000<br>Rp 2.500.000<br>Rp 2.000.000<br><br>Rp 1.060.000<br>Rp 960.000<br>Rp 860.000 | Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Berjumlah 3 (tiga) orang |
| h   | Nilai Pagu Belanja di atas 100.000.000.000,- s.d 250.000.000.000,- | <b>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</b><br>- Pengguna Anggaran<br>- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br>- Pejabat penilai tagihan dan penandatanganan SPM<br>- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)<br>- Bendahara Pengeluaran,<br>Bendahara Pembantu<br><br><b>b. Tim Pelaksana Kegiatan</b><br>- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>- Anggota  | Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br><br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br><br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br><br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan<br><br>Orana/Bulan<br>Orana/Bulan  | Rp 4.500.000<br>Rp 4.500.000<br>Rp 4.200.000<br>Rp 2.000.000<br><br>Rp 1.520.000<br>Rp 1.800.000<br>Rp 1.500.000<br><br>Rp 1.520.000<br>Rp 980.000   |  |

| No. | URAIAN   | RINCIAN KEGIATAN   | SATUAN   | STANDAR BIAYA (Rp.)  | KET  |
|-----|--|--|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
|     |  | <b>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Barang & Jasa (konstruksi)<br>- Barang (non konstruksi)<br>- Jasa (non konstruksi)<br><br><b>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Ketua<br>- Sekretaris<br>- Anggota  | Orang/Paket<br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br><br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br>Orang/Paket   | Rp 3,200,000<br>Rp 3,000,000<br>Rp 2,200,000<br><br>Rp 1,450,000<br>Rp 1,350,000<br>Rp 1,250,000   | Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Berjumlah 3 (tiga) orang                         |
| i   | Nilai Pagu Belanja di atas 250.000.000.000,- s.d 500.000.000.000,- | <b>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</b><br>- Pengguna Anggaran<br>- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br>- Pejabat penugsi tagihan dan penandatanganan SPM<br>- Pejabat Penata usahaan Keuangan (PPK-SKPD)<br>- Bendahara Pengeluaran,<br>Bendahara Pembantu<br><br><b>b. Tim Pelaksana Kegiatan</b><br>- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>- Anggota  | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br><br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br><br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan   | Rp 5,000,000<br>Rp 5,000,000<br>Rp 4,800,000<br>Rp 2,500,000<br><br>Rp 1,780,000<br><br>Rp 2,000,000<br>Rp 1,700,000<br><br>Rp 1,780,000<br>Rp 1,150,000   |  |
|     |  | <b>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Barang & Jasa (konstruksi)<br>- Barang (non konstruksi)<br>- Jasa (non konstruksi)<br><br><b>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Ketua<br>- Sekretaris<br>- Anggota  | Orang/Paket<br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br><br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br>Orang/Paket   | Rp 3,800,000<br>Rp 3,500,000<br>Rp 2,500,000<br><br>Rp 1,650,000<br><br>Rp 1,650,000<br>Rp 1,550,000<br>Rp 1,450,000   | Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Berjumlah 3 (tiga) orang                         |
| j   | Nilai Pagu Belanja di atas 500.000.000.000,- s.d 1 Triliun         | <b>a. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan</b><br>- Pengguna Anggaran<br>- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)<br>- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)<br>- Pejabat penugsi tagihan dan penandatanganan SPM<br>- Pejabat Penata usahaan Keuangan (PPK-SKPD)<br>- Bendahara Pengeluaran,<br>Bendahara Pembantu<br><br><b>b. Tim Pelaksana Kegiatan</b><br>- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)<br>- Anggota<br><br><b>c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Barang & Jasa (konstruksi)<br>- Barang (non konstruksi)<br>- Jasa (non konstruksi)<br><br><b>d. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa</b><br>- Ketua<br>- Sekretaris<br>- Anggota | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br><br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br><br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br><br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br><br>Orang/Paket<br>Orang/Paket<br>Orang/Paket | Rp 5,500,000<br>Rp 5,500,000<br>Rp 5,200,000<br>Rp 3,000,000<br><br>Rp 2,040,000<br><br>Rp 2,500,000<br>Rp 2,200,000<br><br>Rp 2,040,000<br>Rp 1,330,000<br><br>Rp 4,200,000<br>Rp 4,000,000<br>Rp 3,800,000<br><br>Rp 1,840,000<br>Rp 1,740,000<br>Rp 1,640,000 | Dalam rangka objektivitas, Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Berjumlah 3 (tiga) orang                         |
| 2   | Honorarium Unit Pelayanan Pelanggan                                | a. Pembina<br>b. Penanggung Jawab<br>c. Kepala ULP<br>d. Sekretaris ULP<br>e. Anggota Sekretariat<br>f. Ketua Pokja ULP<br>g. Sekretaris Pokja ULP<br>h. Anggota Pokja ULP<br>i. Honor Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan ULP  | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan  | Rp 3,000,000<br>Rp 1,500,000<br>Rp 2,000,000<br>Rp 1,500,000<br>Rp 300,000<br>Rp 450,000<br>Rp 400,000<br>Rp 350,000<br>Rp 500,000   |  |
| 3   | Honorarium Pengelola Keuangan Daerah                               | a. Bendahara Umum Daerah<br>b. Kuasa Bendahara Umum Daerah<br>c. Bendahara SKPKD   | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan  | Rp 15,000,000<br>Rp 7,500,000<br>Rp 2,000,000  |  |
| 4   | Tim Pelaksana kegiatan dan Tim Interdis                            | <b>a. Yang ditetapkan Atas Dasar Surat Keputusan Bupati</b><br>- Pengarah<br>- Penanggung Jawab<br>- Koordinator/Ketua<br>- Wakil Ketua<br>- Sekretaris<br>- Anggota<br><br><b>b. Yang ditetapkan atas dasar surat Keputusan Pengguna Anggaran</b><br>- Pengarah<br>- Penanggung Jawab<br>- Koordinator<br>- Ketua<br>- Wakil Ketua<br>- Sekretaris<br>- Anggota   | Orang/Kegiatan<br>Orang/Kegiatan<br>Orang/Kegiatan<br>Orang/Kegiatan<br>Orang/Kegiatan<br>Orang/Kegiatan<br><br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan          | Rp 1,250,000<br>Rp 1,000,000<br>Rp 850,000<br>Rp 650,000<br>Rp 600,000<br>Rp 500,000<br><br>Rp 500,000<br>Rp 450,000<br>Rp 450,000<br>Rp 400,000<br>Rp 350,000<br>Rp 300,000<br>Rp 300,000   | Maksimal anggota adalah sebanyak 6 (enam) orang, dan dapat melebihi dari ketentuan dengan persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah |
| 5   | Honorarium Jasa Kepanitiaannya :                                   | <b>c. Pembawa Acara/Moderator/MC</b><br>- Luar Provinsi<br>- Dalam Provinsi<br>Pembaca Doa/Rohaniwan<br>Pencermamah  | Orang/Kegiatan<br>Orang/Kegiatan<br>Orang/Kegiatan<br>Orang/Kegiatan   | Rp 1,000,000<br>Rp 500,000<br>Rp 400,000<br>Rp 500,000   |  |

| No. | URAIAN   | RINCIAN KEGIATAN   | SATUAN  | STANDAR BIAYA (Rp.)  | KET  |
|-----|--|--|---|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  |
|     |  | Deligen<br>Instruktur SKJ<br>- Profesional<br>- Non Profesional  | Orang/Kegiatan<br>Orang/Kegiatan<br>Orang/Kegiatan  | Rp 200,000<br>Rp 500,000<br>Rp 400,000   |  |
|     |  | <b>CATATAN :</b><br>- Jika terdapat honor tim pelaksana kegiatan yang bersifat khusus, harus memiliki dasar sesuai dengan ketentuan / aturan perundang-undangan yang berlaku;<br>- Honorarium tidak akan dibayarkan apabila telah menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kecuali Kegiatan yang bersifat Lintas sektoral.   |   |  |  |
| 6   | Narasumber / Pembahas dalam rangka Seminar/Rakor/Raker/Sosialisasi/Desiminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Lokakarya/Focus Group Discussion /Kegiatan Sejenis | 1. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus<br>2. Pejabat Eselon I/Yang disetarakan<br>3. Pejabat Eselon II/Yang disetarakan<br>4. Pejabat Eselon III ke bawah disetarakan dengan pejabat fungsional  | Orang/ Jam<br>Orang/ Jam<br>Orang/ Jam<br>Orang/ Jam  | Rp 1,700,000<br>Rp 1,400,000<br>Rp 1,000,000<br>Rp 900,000   |  |
| 7   | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara   | 1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli<br>2. Honorarium Beracara   | Orang/ Kali<br>Orang/ Kali  | Rp 1,800,000<br>Rp 1,800,000   |  |
| 8   | Vakasi Penyelenggara Ujian   | <b>Setingkat Pendidikan Dasar</b><br>a. Penyusunan/Pembuatan bahan ujian<br>b. Pemeriksaan Hasil Ujian<br>c. Pengawas Ujian<br><br><b>Setingkat Pendidikan Menengah</b><br>a. Penyusunan/Pembuatan bahan ujian<br>b. Pemeriksaan Hasil Ujian<br>c. Pengawas Ujian<br><br><b>Setingkat Pendidikan Tinggi</b><br>a. Penyusunan/Pembuatan bahan ujian<br>b. Pemeriksaan Hasil Ujian<br>c. Pengawas Ujian                    | Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian<br>Orang/hari<br><br>Naskah/Pelajaran Siswa/Mata Ujian<br>Orang/hari<br><br>Naskah/Pelajaran Mahasiswa/Mata Ujian<br>Orang/Hari | Rp 150,000<br>Rp 5,000<br>Rp 240,000<br><br>Rp 190,000<br>Rp 7,500<br>Rp 270,000<br><br>Rp 250,000<br>Rp 10,000<br>Rp 290,000                                  |  |
| 9   | Honorarium Instruktur  | - Instruktur   | Orang/ Jam  | Rp 200,000   |  |
| 10  | Honorarium Penyuluh NON PNS  | a. SLTA<br>b. Sarjana Muda<br>c. Sarjana (S1)<br>d. Master (S2)  | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan  | Rp 1,500,000<br>Rp 1,800,000<br>Rp 2,100,000<br>Rp 2,500,000   | Penyuluh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diwajibkan memiliki Sertifikasi Khusus Penyuluh sesuai dengan bidangnya  |
| 11  | Honorarium Tenaga Kerja di Lingkungan Pemerintah<br>a. <i>Jasa Tenaga Kerja/Tenaga Kerja Lainnya</i>   | 1. Jasa Keamanan<br>a. Jasa Keamanan Kantor<br>b. Jasa Keamanan Pasar<br>2. Jasa Sopir<br>a. Jasa Tenaga Sopir<br>b. Sopir Alat Angkut (Operasional)<br>c. Operator Alat Berat<br>d. Sopir Mobil Angkutan Sampah<br>3. Petugas/Jasa Kebersihan<br>a. Petugas Kebersihan Kantor<br>b. Petugas Kebersihan Taman/Kota<br>c. Petugas Kebersihan Makam<br>4. Jasa Tenaga Administrasi Umum, Keuangan dan Tenaga Kerja Lainnya | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br><br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br><br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan        | Rp 1,700,000<br>Rp 1,500,000<br><br>Rp 1,200,000<br>Rp 1,400,000<br>Rp 2,000,000<br>Rp 1,400,000<br><br>Rp 800,000<br>Rp 1,100,000<br>Rp 800,000<br>Rp 800,000 | Diangkat dan Ditetapkan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja bersama Kepala SKPD   |
|     | b. <i>Operator Komputer (Aplikasi)</i>   | 5. Operator Aplikasi SIMDA dan Operator Aplikasi Lainnya   | Orang/Bulan   | Rp 500,000   | Diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD  |
|     | c. <i>Honor Verifikator/Penguji SPJ</i>  | 6. Honor Verifikator/Penguji SPJ pada SKPD<br>7. Honor Verifikator Dana BOS  | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan  | Rp 400,000<br>Rp 500,000   | Diangkat dan Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKPD Khusus Dinas Pendidikan, Diangkat dan ditetapkan berdasarkan SK Kepala SKPD  |
| 12  | Honor Petugas Stan/Pameran   | Honor Petugas Stan/Pameran<br>a. Luar Daerah<br>b. Dalam Daerah  | Orang/Hari<br>Orang/Hari  | Rp 300,000<br>Rp 200,000   | Wajib melampirkan Surat Perintah Tugas   |
| 13  | Satuan Biaya Uang Makan PNS  | - Uang Makan PNS   | Orang/Hari  | Rp 20,000  | Sesuai dengan Absen masuk kerja. Pegawai Yang Dinas Luar, Cuti, dan tidak masuk kerja krn alasan lainnya tidak diperhitungkan.   |
| 14  | Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur<br>a. <i>Uang Lembur</i>  | <b>Hari Kerja</b><br>a. PNS<br>b. Non PNS<br><b>Hari Libur</b><br>a. PNS<br>b. Non PNS   | Orang/Jam<br>Orang/Jam<br><br>Orang/Jam<br>Orang/Jam  | Rp 25,000<br>Rp 18,000<br><br>Rp 30,000<br>Rp 20,000   | Ketentuan :<br>- Wajib melampirkan Surat Perintah Tugas Lembur<br>- Perhitungan biaya Lembur pada hari kerja maksimal 3 jam/hari<br>- perhitungan biaya lembur pada hari libur maksimal 5 jam/hari<br>- wajib melampirkan absensi lembur |
|     | b. <i>Uang Makan Lembur</i>  | - Untuk pembayaran Uang Makan hanya diberikan per/Hari   | Orang/Hari  | Rp 25,000  |  |
| 15  | Satuan Biaya Diklat Pimpinan   | a. Diklat Pimpinan Tk.II<br>b. Diklat Pimpinan Tk.III<br>c. Diklat Pimpinan Tk.IV  | Peserta/Ankkatan<br>Peserta/Ankkatan<br>Peserta/Ankkatan  | Rp 30,261,000<br>Rp 22,125,000<br>Rp 20,230,000  | Terkait ketentuan Biaya Diklat Pimpinan dimaksud, disesuaikan dengan Ketentuan yang berlaku.   |
| 16  | Satuan Biaya Latihan Prajabatan  | a. Prajabatan CPNS Gol I, II, dan III Formasi Umum<br>b. Prajabatan CPNS Gol I, II, dan III K1 dan/atau K2   | Peserta/Ankkatan<br>Peserta/Ankkatan  | Rp 9,296,000<br>Rp 2,242,000   | Terkait ketentuan Biaya Diklat Prajabatan dimaksud, disesuaikan dengan Ketentuan yang berlaku.   |
| 17  | Satuan Biaya Konsumsi  | a. Makan<br>b. Snack<br>c. Prasmanan/Catering<br>d. Buah   | Kotak/Kali<br>Kotak/Kali<br>Porsi/Kali<br>Paket   | Rp 25,000<br>Rp 17,000<br>Rp 50,000<br>Rp 100,000  | Makan dan Snack untuk Kegiatan/Acara yang dilaksanakan di Hotel disesuaikan dengan harga yang kesepakatan pada dokumen kontrak   |








|    |  |  |  |  |   |
|----|--|--|--|--|---|
| 10 | RSUD PALI                                | <b>1. PEGAWAI NEGERI SIPPIL (PNS)</b>  |  |  |   |
|    |  | <b>Tambahan Penghasilan (INSENTIF) Berdasarkan Kelangkaan Profesi :</b><br>a. Dokter Umum/Giwi<br>b. Apoteker<br>c. Fisioterapi Wicara<br>d. Tenaga Kesehatan<br>e. Kepala Ruangan<br>f. Tenaga Teknik Elektromedik<br>g. Perawat Anastesi<br>h. Dokter Spesialis                                      | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan                                      | Rp 3.500.000<br>Rp 2.000.000<br>Rp 3.250.000<br>Rp 1.000.000<br>Rp 1.200.000<br>Rp 2.000.000<br>Rp 3.500.000       | Diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan BUPATI                              |
|    |  | <b>2. Non Pegawai Negeri Sipil Honorarium :</b><br>a. Honorarium Paramedis<br>b. Dokter Umum/Giwi<br>c. Perawat Anastesi<br>d. Apoteker<br>e. Dokter Spesialis<br>f. IT (Information and Technology)   | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan   | Rp 800.000<br>Rp 5.000.000<br>Rp 3.500.000<br>Rp 3.000.000<br>Rp 25.000.000<br>Rp 1.500.000                        |   |
|    |  | <b>3. PNS Dan Non PNS Uang Piket / Jaga</b><br>a. Dokter Jaga IGD<br>- Hari Biasa<br>- Hari Libur<br>b. Dokter Jaga BANGSAL<br>- Hari Biasa<br>- Hari Libur<br>c. Honor P3K<br>- Dokter<br>- Petugas Kesehatan<br>- Petugas Non Kesehatan<br>d. Honor Satuan Pengawas Internal (SPI)                   | Orang / Piket<br>Orang / Piket<br><br>Orang / Piket<br>Orang / Piket<br>Orang / Piket<br>Orang/Bulan                                       | Rp 100.000<br>Rp 100.000<br><br>Rp 75.000<br>Rp 50.000<br>Rp 50.000<br>Rp 800.000                                  | Diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala PD                           |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup                   | <b>Honorarium Bulanan / Upah Tenaga Kerja Lainnya</b><br>a. Teknisi Lampu Jalan<br>c. Kondaktur Mobil Sampah   | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan   | Rp 1.500.000<br>Rp 1.000.000   |   |
| 12 | Satuan Polisi Pamong Praja               | <b>Honorarium Bulanan / Upah Tenaga Kerja Lainnya</b><br>a. Honorarium Provost Satpol PP<br>b. Honorarium Sopir, Dalmas, Patwal dan Patroli Satpol PP<br>c. Honorarium Penjaga Keamanan Rumah Dinas Bupati di Palembang  | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan  | Rp 1.500.000<br>Rp 1.500.000<br>Rp 3.000.000   |   |
| 13 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | <b>1. Honorarium PNS</b><br>A. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Tim Interdis)<br>a. Pengarah<br>b. Penanggung Jawab<br>c. Koordinator / Ketua<br>d. Wakil Ketua<br>e. Sekretaris<br>f. Bendahara<br><br><b>2. Honorarium Non PNS</b><br>a. Honorarium Dewan Riset Daerah<br>- Ketua<br>- Anggota | Orang/Kegiatan<br>Orang/Kegiatan<br>Orang/Kegiatan<br>Orang/Kegiatan<br>Orang/Kegiatan<br>Orang/Kegiatan<br><br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan | Rp 1.000.000<br>Rp 750.000<br>Rp 650.000<br>Rp 600.000<br>Rp 550.000<br>Rp 500.000<br><br>Rp 650.000<br>Rp 600.000 | Diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala PD                           |
| 14 | Badan Pendapatan Daerah                  | <b>Honorarium Operator Simda</b><br>a. Operator Aplikasi OM SPAN (DAK Fisik)<br>b. Operator Aplikasi Aladin (DAK Non Fisik)<br>c. Operator DAU Kelurahan<br>d. Operator Simda  | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan   | Rp 500.000<br>Rp 500.000<br>Rp 500.000<br>Rp 500.000   | Diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala PD                           |
| 15 | Kecamatan Talang Ubi                     | 1. Honor RW<br>2. Honor RT<br>3. Honor Linmas  | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan  | Rp 500.000<br>Rp 500.000<br>Rp 300.000   | Diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala PD                           |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil     | 1. Anggota Tim kegiatan Updating, Pelaporan dan<br>2. Anggota Tim kerjasama dan pemanfaatan data<br>3. Anggota Tim percepatan penerbitan dokumen<br>4. Anggota Tim percepatan penerbitan dokumen<br>5. Operator Simpetekas<br>6. Kader tertib administrasi kependudukan                                | Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan<br>Orang/Bulan   | Rp 300.000<br>Rp 300.000<br>Rp 300.000<br>Rp 300.000<br>Rp 300.000<br>Rp 300.000                                   | Diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala PD                           |
| 17 | Dinas Koperasi dan UKM                   | 1. Operator ODS (operator data system)   | Orang/Bulan  | Rp 300.000   | Diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala PD                           |
| 18 | Dinas Pendidikan                         | 1. Tunjangan Transport Guru dan Tenaga Kependidikan  | Orang/ Hari  | Rp 40.000  | Diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati dan Berlaku untuk hari kerja |

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

  
HERI AMALINDO





PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

### NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir  
Melalui Sekretaris Daerah /Asisten Administrasi Umum  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Nomor : 180/ 80 /HK-III/2020

Tanggal : 7 - 2 . 2020

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Disampaikan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dari BPKAD.

Demikian disampaikan, selanjutnya jika bapak berkenan mohon untuk ditandatangani terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR,

**HARYONO, SH., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP 197008081993031006



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
Jalan Merdeka KM 10 Kelurahan Handayani Mulia Kecamatan Talang Ubi

**NOTA DINAS**

**Kepada** : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir  
**Dari** : Plt. Kepala BPKAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  
**Nomor** : 700/ /BPKAD/2020  
**Tanggal** : Januari 2020  
**Lampiran** : 1 (satu) berkas  
**Perihal** : **Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2020**

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali.

Demikian disampaikan atas persetujuan dan petunjuk Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Aset Daerah  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir



**SAPARUDDIN, S.Sos.,M.Si**  
**Pembina / IV.a**  
**NIP.196809021998081002**